

	Pemanfaatan Teknologi Informasi 6. Program Peningkatan Pelayanan Publik			
--	--	--	--	--

3.3. Telaahan Renstra K/L

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-2019, yaitu meningkatkan pelayanan penanaman modal dan meningkatkan realisasi penanaman modal, sejalan dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bontang juga memiliki sasaran strategis yang mendukung Pemerintah Kota mewujudkan peningkatan investasi.

Namun sasaran yang akan diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP masih perlu didukung dengan pendanaan khususnya yang dialokasikan pada APBD mengingat anggaran yang sangat terbatas di DPMPTSP yang menyelenggarakan pelayanan publik berkenaan dengan pelayanan perizinan dan penanaman modal belum memungkinkan untuk melaksanakan seluruh program kerja yang direncanakan dan tertuang pada Renstra DPMPTSP periode 2019 – 2021.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak

dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya peringkat Indonesia atas survey *easy of doing business* dari 72 menjadi 73 dan berada pada peringkat 6 Asia Tenggara menuntut kita untuk merespon dengan berbagai perbaikan dalam 10 aspek diantaranya perbaikan layanan kemudahan memulai usaha;
2. Iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal masih menjadi faktor yang mempengaruhi berjalannya investasi di Kota Bontang, sehingga diperlukan komitmen dari Pemerintah Kota dalam memfasilitasi dan menyederhanakan perizinan usaha dan investasi. Peningkatan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu didukung dengan sumber daya aparatur yang memahami penyelenggaraan PTSP dan Penanaman Modal.
3. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat menuntut Pemerintah Kota memberikan informasi yang akurat dan cepat serta kemudahan dalam melayani masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi terkini, untuk itu diupayakan pengembangan untuk meningkatkan teknologi informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga dapat memberikan kemudahan bagi calon investor dan para pemohon izin untuk mengakses informasi yang dibutuhkan.

Dengan dirumuskannya isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi sehingga dapat mendorong daya saing investasi serta realisasi investasi di Kota Bontang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun. Tujuan dan sasaran berdasarkan misi pemerintah Kota Bontang dijabarkan melalui tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Misi Pemerintah Kota Bontang

Misi 3 : menjadikan Kota Bontang sebagai *Creative City* melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	REALISASI KINERJA			TARGET KINERJA		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(10)	(11)	(12)
Mewujudkan iklim investasi yang berdaya saing dan kemudahan investasi		Nilai Investasi PMA dan PMDN						
	Meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi	1. Nilai investasi berskala nasional (PMDN) Rp.x(000.000,-)	4.112.008	5.111.733	5.955.705	1.488.926	1.563.723	1.641.909
		2. Nilai investasi berskala nasional (PMA) \$.x(000,-)	235.349	531.468	188.092	188.093	206.902	227.592
	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	Nilai IKM	76,39	79,97	81,04	84	85	86

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan sangat diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Penanaman Modal dan PTSP harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kota Bontang secara keseluruhan.

**Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Mewujudkan iklim investasi yang berdaya saing dan kemudahan investasi	Meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi	Meningkatkan pelayanan dan pengendalian penanaman modal	1. Peningkatan promosi 2. Peningkatan fasilitasi investasi 3. Peningkatan pengendalian investasi 4. Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha
	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	Mewujudkan percepatan dan kemudahan proses pelayanan	1. Peningkatan kualitas pelayanan terpadu satu pintu 2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN****6.1 Program**

Bertolak dari Sasaran-Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan, disusunlah program-program kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bontang sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
6. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
7. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi Investasi.
8. Program peningkatan kualitas pelayanan publik.
9. Program penyusunan produk hukum daerah.
10. Program peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan
11. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
12. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

6.2 Kegiatan

Untuk mewujudkan program di atas, disusun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang merupakan penjabaran Strategi dan Kebijakan untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran perangkat daerah.

Kegiatan-kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bontang yang akan dilakukan sebagai penjabaran program-program adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan:
 - a. Penyediaan jasa surat-menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - d. Penyediaan jasa kebersihan Kantor
 - e. Penyediaan alat tulis kantor
 - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
 - i. Penyediaan bahan logistik kantor
 - j. Penyediaan makanan dan minuman
 - k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - l. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan:
 - a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
 - f. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
 - g. Pengadaan peralatan dan perlengkapan ruang rapat

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :
 - a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan:
 - a. Pendidikan dan pelatihan formal
 - b. Peningkatan Kompetensi SDM/Aparatur dalam rangka Optimalisasi pelayanan perizinan
 - c. Bimbingan teknis team building
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan:
 - a. Penyusunan Laporan Review Rencana Strategis (RENSTRA)
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
 - c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - d. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA)
 - e. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan:
 - a. Pengembangan Promosi Potensi Daerah
 - b. Fasilitasi Potensi Investasi

7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan:
 - a. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal
 - b. Bimbingan Teknis LKPM Online melalui SPIPISE
 - c. Percepatan Pengembangan Investasi
 - d. Pemantauan, monitoring dan Evaluasi pada Penanam Modal
 - e. Laporan data informasi dan evaluasi pada penanam modal
 - f. Pelayanan pendaftaran penanaman modal melalui SPIPISE
 - g. Penyusunan Kajian Pengembangan Potensi Daerah

8. Program peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam kegiatan:
 - a. Penyusunan SOP Perizinan dan Non Perizinan
 - b. Penyusunan SOP Penanaman Modal
 - c. Penyusunan SP Perizinan dan Non Perizinan
 - d. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Inovasi
 - e. Survey Kepuasan Masyarakat
 - f. Monitoring, Pelaporan dan evaluasi layanan Perizinan
 - g. Pelayanan Advokasi Perizinan
 - h. Sosialisasi Peningkatan Pelayanan publik
 - i. Pelayanan informasi Perizinan
 - j. Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik
 - k. Pendampingan penyusunan standard pelayanan minimal (SPM)
 - l. Penyusunan review standard pelayan publik

9. Program Penyusunan Produk Hukum Daerah yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan:
 - a. Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
10. Program peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diwujudkan dalam kegiatan:
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non perizinan
 - b. Pojok layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - c. Pelayanan IMB Tuntas
11. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan:
 - a. Pengadaan Aplikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
 - b. Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
 - c. Pengembangan aplikasi Perizinan dan Non Perizinan
 - d. Pengadaan Aplikasi pelayanan internal
 - e. Pengembangan sistem informasi perizinan elektronik
12. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan:
 - a. Bontang City Carnival
 - b. Pelaksanaan pameran pembangunan

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode 2019 – 2021 digambarkan dalam tabel 6.1. (terlampir)